

Respon Kebijakan Kurikulum Merdeka di Lembaga Pendidikan Islam

Anita Puji Astutik,¹ Rizal Farista²

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Korespondensi: ¹*anitapujiaastutik@umsida.ac.id*.

ABSTRAK

Dunia pendidikan di Indonesia secara konsisten mengalami kemerosotan sejak 15 tahun terakhir. Keadaan tersebut semakin diperburuk dengan terjadinya wabah pandemi Covid-19. Berbagai langkah strategis telah dilakukan pemerintah guna menanggulangi persoalan tersebut, salah satunya melalui sosialisasi tentang urgensi penerapan Kurikulum Merdeka. Namun ironisnya, sampai saat ini masih banyak lembaga pendidikan, khususnya lembaga pendidikan Islam yang diketahui masih belum menerapkan Kurikulum Merdeka. SMK Muhammadiyah 1 Taman Sidoarjo merupakan dua lembaga pendidikan Islam yang diketahui telah menerapkan kebijakan Kurikulum Merdeka pada satuan pendidikan masing-masing. Guna mengetahui penerapan Kurikulum Merdeka, serta apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambatnya, maka perlu dilakukan penelitian terhadap kedua lembaga pendidikan Islam tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan penggunaan teknik analisis data yang dipopulerkan Milles dan Hubberman. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, teknik dokumentasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwasanya SMK Muhammadiyah 1 Taman Sidoarjo dan telah menerapkan Kurikulum Merdeka dengan baik. Yang menjadi faktor penghambat adalah ketersediaan informasi dan pendanaan, adapun yang menjadi faktor pendukung yakni kondisi sumber daya dan struktur birokrasi.

Kata kunci: Respon Kebijakan; Kurikulum Mandiri; Institut Pendidikan Islam

A. PENDAHULUAN

Pemerintah pada tahun 2019 mengusung kebijakan baru yang dikenal dengan program “Merdeka Belajar”. Program tersebut diberlakukan di semua jenjang pendidikan formal. Merdeka belajar dipandang sebagai suatu program yang memiliki relevansi dengan agenda peningkatan mutu pendidikan. Menurut prediksi Mendikbud, dengan lahirnya kebijakan ini kedepannya arah pembelajaran akan lebih berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Merdeka Belajar menjadi salah satu program untuk menciptakan suasana belajar di sekolah yang bahagia, baik bagi peserta didik maupun bahagia bagi para guru (Muzamil, 2020). Secara etimologi, Merdeka Belajar merupakan istilah yang tersusun dari dua kata dasar, yaitu merdeka dan belajar. Kata “Merdeka” memiliki tiga pengertian: pertama, bebas (dari perhambatan, penjajahan dan sebagainya), berdiri sendiri; kedua, tidak terkena atau lepas dari tuntutan; dan ketiga, tidak terikat, artinya tidak boleh tergantung kepada orang atau pihak tertentu (Depdiknas, 2003). Adapun konsep “Belajar” dapat dipahami sebagai usaha atau berlatih supaya mendapatkan suatu kepandaian (Selasih, 2016). Belajar sejatinya bukan hanya terbatas pada aktivitas kegiatan menghafal dan bukan mengingat semata (Sukariyadi, 2022). Dengan demikian, merdeka belajar adalah suatu kondisi dimana siswa dan guru terlibat dalam proses belajar dan mengajar, dimana guru dan siswa bebas belajar, bebas menentukan apa yang mau dipelajari sesuai keinginan dan kebutuhannya.

Munculnya kebijakan merdeka belajar disebabkan oleh kondisi pendidikan di Indonesia yang mengalami ketertinggalan dalam sepuluh sampai lima belas tahun terakhir. Informasi tersebut dikuatkan oleh berbagai hasil studi nasional maupun internasional, salah satu diantaranya yaitu PISA. Pada hasil studi tersebut dikatakan bahwasanya 70% siswa berusia 15 tahun masih belum memenuhi target kompetensi minimum dalam hal numerasi dan literasi. Kondisi tersebut semakin diperparah dengan adanya dampak signifikan munculnya wabah Covid-19 terhadap dunia pendidikan di Indonesia (Qosim, 2019). Salah satu masalah baru yang muncul dari persoalan Covid-19 penerapan berlangsungnya proses pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang saat itu nilai sangat tidak efektif. Situasi tersebut menjadi alasan, mengapa PJJ diduga turut memberikan sumbangsih terhadap terjadinya kemerosotan penguasaan literasi dan numerasi para peserta didik (Sherly, 2020). Sistem PJJ dianggap relatif memiliki banyak keterbatasan manakala harus diimplementasikan beriringan dengan Kurikulum 2013. Hal tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan karakteristik diantara keduanya. Beberapa contoh persoalan yang terjadi ketika satuan pendidikan menerapkan sistem PJJ, antara lain: secara kuantitas terjadi penurunan jam pembelajaran, fasilitas sekolah yang belum mampu mengakomodasi sistem pembelajaran online, persoalan

sinyal/jaringan internet yang relatif masih belum merata di beberapa daerah, dan berbagai kendala lainnya. Kondisi inilah yang kemudian menjadikan PJJ dirasa cukup sulit digunakan untuk mengakomodir berbagai karakteristik teknis yang terdapat pada Kurikulum 2013.

Pemerintah dengan sigap segera mengambil upaya-upaya strategis guna menyikapi berbagai persoalan tersebut. Salah satunya melalui kebijakan penggunaan Kurikulum Darurat. Esensi dari Kurikulum Darurat sesungguhnya merupakan hasil simplifikasi dari Kurikulum 2013 yang dapat dikondisikan oleh satuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan peserta didik (R. Vhalery, 2022). Karakteristik dari Kurikulum Darurat inilah yang dinilai relatif lebih “lentur” dalam mengiringi proses PJJ, jika dibandingkan dengan Kurikulum 2013 yang cenderung “kaku”. Pemerintah secara berkesinambungan terus melakukan monitoring terhadap kinerja dari penggunaan Kurikulum Darurat. Dalam beberapa bulan perjalanan, ternyata penggunaan Kurikulum Darurat pada sekolah-sekolah tertentu menunjukkan efektifitas yang lebih baik dibanding sekolah lain yang cenderung konservatif untuk bertahan dengan kurikulum 2013. Melalui paparannya, Mendikbud menyatakan bahwa penggunaan Kurikulum Darurat ternyata berhasil menekan angka learning loss yang disebabkan Covid, yakni sebesar 73% untuk literasi dan 86% untuk numerasi. Kondisi inilah yang akhirnya mendorong pemerintah untuk mulai memproyeksikan sebuah gagasan tentang urgensi pembaharuan kurikulum.

Pemerintah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk bisa menghadirkan kurikulum yang relevan dengan kondisi zaman. Program Guru Penggerak merupakan salah satu bentuk manifestasi dari usaha pemerintah dalam merealisasikan hal tersebut. Melalui program Guru Penggerak, pemerintah secara perlahan tapi pasti, terus mengupayakan rancangan kurikulum baru yang nantinya akan diperkenalkan kepada publik dengan nama Kurikulum Prototipe. Kurikulum Prototipe mulai digunakan pada tahun ajaran 2021/2022. Dalam penerapannya, pemberlakuan Kurikulum Prototipe hanya terbatas pada satuan pendidikan yang terlibat dalam program Sekolah Penggerak. Mendikbud sangat optimis akan kesuksesan dari Kurikulum Prototipe yang notabene merupakan embrio dari lahirnya pembaharuan kurikulum pendidikan di Indonesia. Kurikulum Prototipe telah menjalani proses uji coba secara optimal, yakni dengan melibatkan 2.500 sekolah penggerak. Dari hasil uji coba tersebut akhirnya pemerintah mengeluarkan kebijakan pembaharuan kurikulum yang dikenal dengan nama Kurikulum Merdeka.

Secara umum tidak ada perbedaan karakteristik diantara kedua nama kurikulum tersebut. Hal ini dikarenakan Kurikulum Merdeka sebenarnya hanya merupakan nama baru yang diberikan pemerintah untuk menggantikan nama dari Kurikulum Prototipe. Yang

menjadi pembeda sebenarnya hanya dari sisi implementatornya saja. Jika pada Kurikulum Prototipe penerapannya terbatas hanya pada lembaga yang berpredikat sebagai sekolah penggerak saja, maka pada Kurikulum Merdeka justru sebaliknya. Yaitu pemerintah membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh satuan pendidikan untuk berperan serta dalam mensukseskan proses implementasi Kurikulum Merdeka. Satu tahun pasca tersosialisasikannya kebijakan Kurikulum Merdeka, ternyata masih didapati sejumlah lembaga pendidikan Islam yang masih belum sepenuhnya mengimplementasikan Kurikulum Merdeka. Keadaan ini diakibatkan oleh berbagai faktor yang tentunya berbeda-beda antara satu lembaga dengan lembaga lainnya. Namun demikian, pemerintah masih tetap memberikan kelonggaran melalui adanya tahapan dalam kebijakan implementasi Kurikulum Merdeka. Terdapat tiga tahapan dalam yang dapat dijadikan opsi oleh tiap lembaga pendidikan dalam merealisasikan kebijakan Kurikulum Merdeka. Ketiga tahapan tersebut antara lain yaitu: Mandiri Belajar, Mandiri Berubah dan Mandiri Berbagi.

SMK Muhammadiyah 1 Taman Sidoarjo merupakan lembaga pendidikan Islam yang diketahui telah menerapkan kebijakan Kurikulum Merdeka. Sampai saat penelitian ini dilakukan, SMK Muhammadiyah 1 Taman Sidoarjo diketahui telah menerapkan Kurikulum Merdeka pada tahapan “Merdeka Berubah”. Tahapan “Merdeka Berubah” bisa dikatakan merupakan level moderate pada opsi pilihan dalam proses penerapan kebijakan Kurikulum Merdeka. Guna memperoleh gambaran secara utuh mengenai seperti apa penerapan kebijakan Kurikulum Merdeka serta apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambatnya, maka sangat diperlukan pendalaman yang komprehensif melalui proses penelitian.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan didefinisikan sebagai aktivitas menjalankan kebijakan, pemenuhan berbagai janji yang termaktub dalam dokumen kebijakan guna menghasilkan output sesuai dengan tujuan kebijakan melalui penuntasan berbagai misi sesuai dengan redaksional yang termuat dalam tujuan kebijakan (Handoyo, 2012). Implementasi kebijakan merupakan persoalan yang relatif sukar sekaligus kompleks. Fenomena tersebut bukan hanya terjadi pada negara berkembang atau negara yang mulai menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik seperti Indonesia, tetapi juga menjadi fenomena di negara-negara maju seperti Amerika Serikat. Fenomena mengenai persoalan tersebut telah disinggung oleh

para ahli analisis proses implementasi kebijakan publik. Diantara ahli tersebut adalah George C. Edwards atau Edward III (Tarigan, 2008).

Ada empat faktor penting yang menurut teori Edward III sangat berpengaruh pada proses implementasi sebuah kebijakan. Keempat faktor yang dimaksudkan yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi (Ramdhani, 2017). Komunikasi menjadi variabel penting yang sangat berpengaruh dalam proses implementasi sebuah kebijakan. Sebaik apapun kualitas dari suatu produk kebijakan, akan menjadi tidak efektif manakala tidak bisa dikomunikasikan dengan optimal. Komunikasi dalam perspektif kajian teori Edward III adalah komunikasi yang terjadi antara formulator kebijakan dengan implementator lapangan untuk selanjutnya diteruskan kepada target sasaran. Komunikasi dipahami sebagai interrelasi dan interaksi antara aktor perumus kebijakan dengan aktor pelaksana kebijakan, serta aktor pelaksana kebijakan dengan kelompok sasaran (target group).

Muatan komunikasi tersebut setidaknya berisikan mengenai substansi sekaligus tujuan dari kebijakan yang telah dibuat. Maka dari itu, para implementator diharapkan memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap karakteristik sebuah kebijakan yang akan diimplementasikan. Hal ini demi menghindari terjadinya distorsi informasi yang pada gilirannya bisa berdampak pada munculnya berbagai respon yang kurang kooperatif (bahkan penolakan secara frontal) dari kelompok sasaran (W.M. Rusnita, 2017).

Ada tiga indikator yang dapat digunakan sebagai parameter dalam menilai keberhasilan dari komunikasi. Ketiga indikator tersebut pada teori Edward III dibahasakan sebagai: Transmision, Clarity dan Consistency (Lukitasari, 2017). Terjadinya proses transfer informasi dari formulator kebijakan kepada implementator kebijakan, serta antara implementator kebijakan dengan kelompok sasaran harus dipastikan berjalan dengan baik demi terpenuhinya indikator transmision pada variabel komunikasi. Untuk merealisasikan idealitas tersebut, maka diperlukan keterlibatan dari tiga elemen transmision, antara lain: Komunikator, Komunikan dan Media (Anhar, 2018). Komunikator diperankan oleh pembuat kebijakan dan para implementator lapangan. Para individu yang memainkan peran sebagai komunikator idealnya harus menguasai substansi maupun karakteristik dari kebijakan yang akan disampaikan. Selain itu para komunikator diupayakan berasal dari orang-orang yang setidaknya memiliki keterampilan dasar Public Speaking, memiliki kepercayaan diri yang tinggi, serta memiliki kemampuan mempengaruhi orang lain (S. W. Lukitasari S. a., 2017).

Indikator Clarity pada ranah komunikasi cenderung mengarah pada persoalan diskripsi atau kejelasan dari sebuah informasi. Kurang detailnya penyampaian informasi dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya penyimpangan dalam proses implementasi sebuah kebijakan. Ketidaktepatan informasi dapat berupa keumuman informasi yang tersampaikan tanpa disertai detail rincian dari langkah-langkah implementasi dari sebuah kebijakan. Disparitas informasi juga bisa disebabkan oleh tidak adanya standar informasi yang bersifat baku. Atau bisa juga diakibatkan oleh level “imajinasi” maupun “kreativitas” para implementor lapangan dalam menafsirkan isi dari sebuah kebijakan yang masih bersifat global. Maka dari itu elemen Clarity menjadi sesuatu yang penting agar informasi yang diberikan menjadi benar-benar gamblang dan jelas (S. W. Lukitasari S. , 2017).

Komunikasi dalam pandangan teori Edward III juga amat dipengaruhi oleh indikator consistency. Dalam konteks ini, consistency (konsistensi) dipahami sebagai sebuah kesesuaian, kesinambungan dan keselarasan penyampaian informasi baik dalam situasi dan kondisi seperti apapun. Konsistensi komunikasi dalam kaitannya dengan proses implementasi sebuah kebijakan menjadi sesuatu yang amat penting demi menjaga kebulatan persepsi dari para implementor. Dengan terjaganya persepsi tersebut diharapkan para implementor mampu mencapai target tujuan dari sebuah kebijakan.

Sumber daya menurut perspektif teori Edward III memegang peranan yang krusial dalam kaitannya dengan proses implementasi sebuah kebijakan. Meskipun proses komunikasi sudah berjalan dengan efektif, proses implementasi sebuah kebijakan akan memiliki potensi besar untuk menemui kegagalan manakala tidak didukung oleh keberadaan sumber daya yang memadai. Inilah yang menjadikan variabel sumber daya menempati skala prioritas kedua setelah variabel komunikasi. Sumber daya yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan proses implementasi sebuah kebijakan, antara lain terdiri dari: Staf, Informasi, kewenangan dan fasilitas (Akib, 2008).

Sebagai bagian dari variabel sumber daya, keberadaan staf yang memadai menjadi sesuatu yang urgent. Konsep memadai dalam persoalan staf ialah adanya kecukupan dari sisi kuantitas maupun kualitas. Sumber daya juga dapat berupa ketersediaan berbagai data yang relevan dan tepat guna sebagai representasi dari keberadaan sumber daya informasi. Sumber daya berupa Informasi yang akurat disediakan untuk mengakomodasi kebutuhan terkait proses pengambilan keputusan. Selain itu diperlukan pula sumber daya berupa kewenangan, yang bermakna adanya pemberian otoritas yang layak bagi para aktor implementasi kebijakan sesuai dengan pembagian yang proporsional. Adanya kewenangan

yang cukup pada diri aktor pelaksana berperan besar dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mereka di lapangan (Munthe, 2018).

Untuk menyempurnakan kelengkapan variabel sumber daya, maka keberadaan fasilitas menjadi bagian yang tidak terpisahkan demi menunjang keberhasilan dari proses implementasi sebuah kebijakan. Fasilitas yang dimaksudkan tidak hanya terbatas berupa sarana, prasarana. Lebih dari itu, keberadaan dana yang likuid terkait fungsi pembiayaan proses implementasi kebijakan juga dapat dikategorikan dalam lingkup fasilitas (Ramdhani A. , 2017). Ringkasnya, ketersediaan berbagai fasilitas tersebut sangat diperlukan dalam mendukung keberhasilan proses implementasi sebuah kebijakan.

Variabel disposisi (disposition) merupakan variabel ketiga yang juga turut berpengaruh pada efektifitas implementasi sebuah kebijakan. Sikap atau karakter dari para pelaksana dapat memberikan pengaruh besar terhadap kesuksesan proses implementasi sebuah kebijakan. Dalam teori Edward fenomena demikian dibahasakan dengan istilah disposition atau disposisi. Sikap tersebut dapat muncul dalam bentuk positif, seperti dedikasi tinggi untuk mengupayakan keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Selain itu, sikap juga bisa berkonotasi negatif, yaitu ketika para pelaksana suatu kebijakan “menampakkan” respon yang tidak kooperatif terhadap arah tujuan dari sebuah kebijakan. Sikap para aktor pelaksana yang semacam ini akan dinilai sebagai sesuatu yang kontraproduktif meskipun para aktor pelaksana tersebut memiliki kualitas dan kuantitas yang memadai. Maka dari itu, diperlukan adanya keselarasan sikap atau perspektif dari para pembuat kebijakan dengan para implementor yang ada (Z.N. Heliza, 2017).

Ada dua strategi yang dapat digunakan untuk mengupayakan keberhasilan dalam kaitannya dengan disposisi. Strategi pertama dilakukan dengan melakukan penataan struktur organisasi, Sedangkan yang kedua dapat diupayakan melalui strategi pengaturan insentif. penataan struktur organisasi dilakukan dengan cara penunjukan dan pengangkatan staf yang memiliki kapabilitas sesuai dengan kebutuhan, namun dengan tetap mempertimbangkan faktor dedikasi. Adapun strategi pengaturan insentif dapat dilakukan dengan cara memberikan tambahan benefit tertentu bagi para implementator. Dengan adanya tambahan benefit tersebut diharapkan dapat memotivasi para implementator untuk “berkenan” bergerak sesuai dengan arah yang diharapkan (Y. Widiawati, 2021).

Struktur birokrasi menjadi variabel terakhir yang dalam teori Edward III dipandang memiliki pengaruh terhadap implementasi sebuah kebijakan. Terjadinya komunikasi yang optimal yang disertai kecukupan segala sumber daya yang diperlukan dan didukung pula dengan adanya disposisi yang baik, masih belum memungkinkan tercapainya efektifitas

dalam proses implementasi sebuah kebijakan. Kelemahan dari sisi struktur birokrasi kerap kali menjadi penyebab terjadinya permasalahan tersebut. Untuk itu diperlukan langkah-langkah strategis sebagai bentuk upaya preventif guna mengantisipasi terjadinya kelemahan pada struktur birokrasi (Syahrudin, 2016). Setidaknya terdapat dua upaya yang dapat mengoptimalkan kinerja dari struktur birokrasi. Pertama, melalui konsep fleksibilitas SOP (Standart Operating Procedures). Secara istilah, SOP diartikan sebagai mekanisme terencana yang secara rutin dijalankan oleh para implementator dalam melaksanakan fungsi kerja harian. Pada SOP tersebut terdapat suatu gambaran menyeluruh mengenai berbagai aspek penugasan yang disertai mekanisme pelaksanaannya. Dalam teori Edward III, SOP yang “kaku” berpotensi besar menjadi penghambat proses implementasi sebuah kebijakan. Hal ini dikarenakan adanya kecenderungan dari proses implementasi kebijakan baru dengan pola kerja maupun karakteristik organisasi yang baru. Maka dari itu, semakin besar perubahan pola kerja yang dituntut oleh implementasi sebuah kebijakan, maka akan selalu berbanding lurus dengan probabilitas SOP dalam menghambat keberhasilan dari proses implementasi kebijakan tersebut.

Upaya kedua untuk mengoptimalkan kinerja dari struktur birokrasi ialah dengan melaksanakan fragmentasi. Dalam tataran praktis, fragmentasi pada struktur birokrasi dilakukan dengan pendistribusian tanggung jawab berbagai kegiatan atau program kepada beberapa unit kerja yang sesuai. Melalui mekanisme inilah penyelesaian aktivitas atau program kegiatan dapat tertangani secara profesional oleh bagian-bagian yang kapabel. Dengan adanya fragmentasi yang baik, diharapkan implementasi sebuah kebijakan akan dapat berjalan dengan efektif (Jusman, 2016).

C. METODE

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian lapangan adalah penelitian yang melibatkan lokasi atau tempat tertentu yang nantinya akan digunakan untuk mencermati berbagai fenomena terkait penelitian yang terjadi pada tempat tersebut (Rasidi, 2020). Dalam bahasa akademisi, lokasi tersebut sering disebut sebagai lokus penelitian (Ramdhan, 2021). Yang menjadi lokus pada penelitian ini adalah SMK Muhammadiyah 1 Taman Sidoarjo. Metode deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian yang dilakukan untuk menginterpretasikan atau mendeskripsikan sesuatu (Rusli, 2021). Peneliti merupakan instrumen utama pada penelitian kualitatif, khususnya dalam upaya pengumpulan data, yang merupakan berbagai

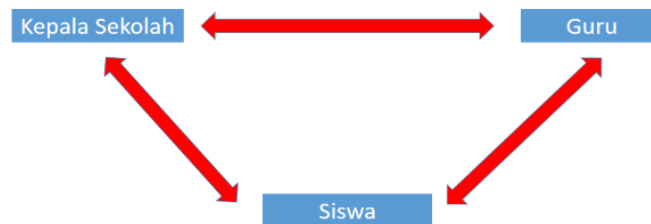
bentuk informasi mengenai fakta maupun fenomena, baik berupa angka maupun pernyataan (Musfiqon, 2012).

Dalam proses pengumpulan data, peneliti berperan sebagai pengamat sekaligus pencari fakta (Kaharuddin, 2020). Pengumpulan data menggunakan teknik observasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kegiatan penelitian ini. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan terhadap keadaan atau perilaku sasaran penelitian secara langsung pada lokus penelitian (Herdayati, 2019). Dalam rangkaian kegiatan observasi umumnya juga disertai dengan proses pencatatan maupun pemotretan. Pengumpulan data dengan teknik dokumentasi juga diterapkan dalam penelitian ini. Teknik dokumentasi didefinisikan sebagai upaya pengumpulan data penelitian dengan memanfaatkan berbagai dokumen yang memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan, baik berupa dokumen tercetak maupun dokumen digital (Romadhon, 2021). Untuk memperoleh data penelitian yang mendalam, maka peneliti melakukan penggalian data melalui proses wawancara yang dilakukan dengan proses tanya jawab secara lisan (Fadhallah, 2021).

Adapun para informan dalam penelitian ini yang memungkinkan untuk diwawancarai antara lain: Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, para guru dan siswa. Informan sebagai salah satu sumber data dipilih secara purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau dia sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti (Lenaini, 2021).

Sumber data pada sebuah penelitian harus dapat diupayakan validitasnya sebagai jaminan bagi kemantapan pada tahapan simpulan dan tafsiran makna sebagai hasil dari sebuah penelitian (Mekarisce, 2020). Terdapat beberapa cara yang biasanya dipilih untuk mengembangkan validitas (kesahihan) data penelitian. Salah satu teknik validasi data yang digunakan peneliti pada penelitian ini adalah teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap hal tersebut. Triangulasi merupakan sebuah pendekatan analisis data yang mensintesa data dari berbagai sumber. Dengan pendekatan teknik triangulasi metode ganda diharapkan dapat menjamin keabsahan data penelitian. Dengan demikian triangulasi sejatinya bukanlah bertujuan untuk mencari kebenaran, namun penggunaannya lebih diarahkan pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap data penelitian yang dimilikinya (Bachri, 2010). Dari berbagai ragam pendekatan

yang sering digunakan pada teknik triangulasi, maka triangulasi sumber dan triangulasi metode merupakan salah satu pendekatan yang cenderung diprioritaskan dalam penelitian ini. Triangulasi sumber diartikan sebagai proses validasi data dengan membandingkan masukan informasi dari berbagai sumber untuk memperoleh sebuah data atau informasi (Mariyani, 2020). Contoh penerapan dari teknik ini ialah ketika peneliti membandingkan data mengenai perspektif kepala sekolah, guru dan wali murid mengenai implementasi Kurikulum Merdeka pada sebuah lembaga pendidikan Islam.



Gambar 1. Teknik Triangulasi Sumber

Adapun triangulasi metode, diartikan sebagai upaya komparasi yang dilakukan peneliti guna memperoleh sebuah data atau informasi dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data (Hadi S. , 2017). Salah satu contoh penerapannya ialah ketika peneliti berusaha mengumpulkan data tentang pengertian sebuah istilah yang dapat dilakukan dengan perpaduan antara teknik dokumentasi dan teknik wawancara secara langsung.



Gambar 2. Teknik Triangulasi Metode

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Teknik analisis data yang dipopulerkan oleh Miles & Huberman. Pada teknik analisis data tersebut, peneliti memulainya dari proses reduksi data, penyajian data yang diakhiri dengan proses penarikan kesimpulan. Alur analisis data tersebut seluruhnya digunakan untuk melakukan analisis terhadap keseluruhan data yang diperoleh dalam penelitian ini (Hadi A. a., 2021). Adapun instrumen penelitian yang berupa pedoman wawancara menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penulisan laporan penelitian ini.



Gambar 3. Teknik Analisis Data Miles dan Hubberman

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan Kurikulum Merdeka

Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Penekanan Kurikulum Merdeka berada pada pembelajaran intrakurikuler yang beragam. Sedangkan bagi peserta didik, berdampak pada kebutuhan belajar dan minat peserta didik terpenuhi secara optimal. Hal tersebut dikarenakan para peserta didik memiliki waktu yang cukup untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi (Pratycia, 2023).

Pada bulan Februari 2022 pemerintah secara resmi mensosialisasikan Kurikulum Merdeka melalui seri ke-15 dari kebijakan Merdeka Belajar. Namun demikian, kehadiran Kurikulum Merdeka tidak lantas menjadi “paksaan” bagi setiap satuan pendidikan. Hal ini dikarenakan pemerintah masih memberikan opsi bagi tiap-tiap satuan pendidikan untuk memilih kurikulum yang dinilai paling linier dengan kondisi lembaga masing-masing. Setiap sekolah diperbolehkan menggunakan Kurikulum 2013, Kurikulum Darurat maupun Kurikulum Merdeka sembari menunggu terjadinya proses evaluasi Kurikulum 2013 pada tahun 2024 mendatang. Terlepas dari hal tersebut, dunia pendidikan ternyata menampakkan antusiasme yang cukup tinggi dalam merespon hadirnya Kurikulum Merdeka. Sampai saat penelitian ini dilakukan, diketahui setidaknya 143.256 sekolah di seluruh Indonesia telah mengambil opsi penerapan Kurikulum Merdeka (Hutabarat, 2022).

Kurikulum Merdeka memiliki tiga keunggulan utama. Pertama, Kurikulum Merdeka menyediakan kesempatan yang lebih luas bagi para siswa untuk bisa lebih mengembangkan potensi dan minatnya sesuai dengan esensi dari program Merdeka Belajar. Kedua, Kurikulum Merdeka mengupayakan penyederhanaan dalam hal materi ajar agar pembelajaran bisa lebih sederhana dan esensial, namun dengan tetap menjaga kesesuaiannya

dengan jenjang pendidikan yang terdapat pada masing-masing sekolah. Ketiga, penerapan Kurikulum Merdeka dinilai lebih interaktif sekaligus linier dengan kondisi pada era kontemporer. Kegiatan pembelajaran yang pada kurikulum sebelumnya lebih dominan berorientasi pada guru akan mengalami perubahan arah, yakni lebih didominasi oleh peserta didik. Keadaan tersebut menjadikan siswa lebih leluasa untuk berinovasi sekaligus mengembangkan pemikiran yang lebih terbuka. Salah satu contohnya melalui pembelajaran berbasis *Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila* (Sumaryanti, 2023).

Struktur Kurikulum Merdeka didesain dengan prinsip pendidikan yang berpusat pada murid, sehingga dalam pelaksanaannya masing-masing satuan pendidikan dapat mengembangkan kurikulum operasional sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan tersebut, namun tetap berdasarkan kerangka dasar kurikulum yang telah dikembangkan oleh pemerintah pusat (Roihanah, 2022). Kurikulum Merdeka memiliki *Capaian Pembelajaran (CP)* untuk setiap jenjang pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam bentuk peraturan. Dengan kata lain, Kurikulum Merdeka dapat dikatakan sebagai kurikulum nasional, sehingga dapat CP dalam Kurikulum Merdeka disebut sebagai *Capaian Pembelajaran Kurikulum Nasional* [19]. CP dijabarkan menjadi beberapa *Tujuan Pembelajaran (TP)* dalam satu fase, kemudian TP disusun ke dalam *Alur Tujuan Pembelajaran (ATP)*. ATP didefinisikan sebagai perencanaan dan pengaturan pembelajaran serta asesmen secara garis besar untuk jangka waktu satu fase (Gandasari, 2022).

Secara umum, Kurikulum Merdeka tersusun atas program intrakurikuler, program ekstrakurikuler, dan *Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5)*. *Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila* menjadi terobosan baru yang sama sekali belum ditemukan pada kurikulum sebelumnya. *Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila* adalah pembelajaran lintas disiplin ilmu yang kontekstual dan berbasis pada kebutuhan masyarakat atau permasalahan di lingkungan satuan pendidikan. P5 menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis *projek (project-based learning)* yang fleksibel dari segi muatan, kegiatan, dan waktu pelaksanaan. Tujuan dari *projek* ini adalah untuk menguatkan berbagai kompetensi siswa dalam *Profil Pelajar Pancasila*, sehingga tujuan, muatan, dan kegiatan pembelajaran *projek* tidak harus dikaitkan dengan tujuan dan materi pelajaran intrakurikuler (Safitri, 2022).



Gambar 4. Profil Pelajar Pancasila

(Sumber: Kemendikbudristek, 2021)

Definisi dari Profil Pelajar Pancasila adalah pelajar yang merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Definisi tersebut memuat tiga kata kunci: pelajar sepanjang hayat, kompeten, dan nilai-nilai Pancasila. Hal ini menunjukkan adanya paduan antara penguatan identitas khas Bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, sebagai rujukan karakter pelajar Indonesia; dengan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan sumber daya manusia Indonesia dalam konteks perkembangan Abad 21 (Rachmawati, 2022). Jika diejawantahkan lebih mendalam, maka terdapat enam dimensi yang menjadi karakteristik dari Profil Pelajar Pancasila, yaitu: beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebhinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis dan juga kreatif (Solehudin, 2022). Penyusunan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila pada sebuah satuan pendidikan harus sesuai dengan tema-tema yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Tema tersebut adalah kearifan lokal, gaya hidup berkelanjutan, bhinneka tunggal ika, bangunlah jiwa dan raganya, suara demokrasi, rekayasa dan teknologi (Irawati, 2022).

2. Analisis Respon Kebijakan Kurikulum Merdeka di Lembaga Pendidikan Islam

Sebagaimana telah dijabarkan pada bagian sebelumnya, yakni mengenai 4 variabel yang menurut Edward III berpengaruh terhadap proses implementasi suatu kebijakan. Keseluruhan variabel tersebut antara lain: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Berpegang pada teori tersebut, pada bagian ini peneliti akan memaparkan

hasil analisis dari proses implementasi kebijakan Kurikulum Merdeka di SMK Muhammadiyah 1 Taman Sidoarjo.

Tahun 2019 pemerintah mengeluarkan kebijakan Merdeka Belajar sebagai salah satu solusi guna memperbaiki keadaan pendidikan di Indonesia. Kebijakan Merdeka Belajar sampai saat ini telah melahirkan beberapa seri program kebijakan peningkatan mutu pendidikan, salah satunya ialah kebijakan Kurikulum Merdeka. Pemerintah menghimbau agar setiap lembaga pendidikan mulai menerapkan Kurikulum Merdeka secara bertahap sesuai dengan kesiapan dan kondisi masing-masing. Tahapan tersebut dapat dimulai dari IKM Mandiri Belajar, Mandiri Berubah dan Mandiri Berbagi. Himbauan tersebut berkaitan dengan adanya wacana tentang penggunaan Kurikulum Merdeka sebagai kurikulum nasional pada tahun 2024 mendatang. Melihat urgensi tersebut, SMK Muhammadiyah 1 Taman Sidoarjo mengambil pilihan untuk segera memulai proses IKM guna memberikan kesempatan adaptasi yang cukup kepada lembaga dan seluruh tenaga kependidikan yang ada di dalamnya.

SMK Muhammadiyah 1 Taman Sidoarjo merupakan salah satu sekolah diketahui telah melaksanakan proses Implementasi Kurikulum Merdeka atau IKM. Sebagai lembaga pendidikan Islam, SMK Muhammadiyah 1 Taman Sidoarjo dikenal memiliki dedikasi tinggi dalam menghasilkan output lulusan yang berkualitas, baik secara akademik maupun spiritual. Hal tersebut secara eksplisit terlihat dari apa yang menjadi visi lembaga, yakni mengupayakan “terwujudnya generasi unggul berdasarkan nilai Islam, berakhlak mulia dan berwawasan global”. Lebih dari itu, kesadaran akan pentingnya penyelenggaraan pendidikan yang relevan dengan tuntutan perkembangan zaman juga tetap menjadi landasan filosofis kepemimpinan lembaga. SMK Muhammadiyah 1 Taman Sidoarjo termasuk salah satu lembaga pendidikan Islam yang menampakkan antusiasme tinggi dalam merespon hadirnya Kurikulum Merdeka. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya inisiatif pimpinan lembaga untuk mendaftar sebagai peserta IKM jauh-jauh hari sebelum pemerintah melakukan sosialisasi. Kepesertaan SMK Muhammadiyah 1 Taman Sidoarjo dalam proses IKM diketahui terealisasi sejak sebelum dimulainya tahun ajaran 2021/2022. Adapun mengenai pelaksanaan, maka SMK Muhammadiyah 1 Taman Sidoarjo secara resmi mulai menjalankan proses IKM pada tahun ajaran 2022/2023.

Kondisi sarana dan prasarana yang cukup memadai tidak lantas menjadikan SMK Muhammadiyah 1 Taman Sidoarjo merasa tinggi hati dalam menyikapi proses IKM. Hal ini terlihat dari pilihan sikap pimpinan lembaga yang lebih memilih opsi “Mandiri Berubah” ketimbang “Mandiri Berbagi” dalam kaitannya dengan proses IKM di SMK

Muhammadiyah 1 Taman Sidoarjo. Terlepas dari hal tersebut, berdasarkan appraisal yang dilakukan oleh tim pengawas, secara umum SMK Muhammadiyah 1 Taman Sidoarjo diketahui memiliki tingkat kelayakan untuk menjadi menjalankan IKM pada tingkat “Mandiri Berbagi”. Persepsi tersebut agaknya tidak berlebihan manakala diselaraskan dengan kapabilitas yang dimiliki oleh SMK Muhammadiyah 1 Taman Sidoarjo. Secara faktual, kecakapan yang dimiliki lembaga dalam melakukan improvisasi atau modifikasi terhadap perangkat pembelajaran merupakan indikator yang dapat dijadikan bukti kelayakan SMK Muhammadiyah 1 Taman Sidoarjo untuk masuk pada tahapan IKM “Mandiri Berbagi”.

Kepala Sekolah memiliki peranan penting dalam merealisasikan IKM di SMK Muhammadiyah 1 Taman Sidoarjo. Hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana Upaya yang dilakukan Kepala Sekolah dalam mengeksplorasi setiap informasi terkait IKM dari pemerintah, untuk kemudian didistribusikan secara proporsional pada seluruh warga sekolah. Kesigapan dan kepekaan semacam inilah yang menjadi salah satu indikator penentu keberhasilan IKM di SMK Muhammadiyah 1 Taman Sidoarjo. Selain itu, penggunaan strategi yang relevan juga diupayakan secara optimal oleh Kepala Sekolah dalam mensosialisasikan IKM kepada para tenaga kependidikan yang ada di SMK Muhammadiyah 1 Taman Sidoarjo.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah bagian Kurikulum SMK Muhammadiyah 1 Taman Sidoarjo, diketahui bahwasanya proses implementasi kebijakan Kurikulum Merdeka telah berjalan dengan baik. Terkait variabel komunikasi, maka dibagi menjadi dua proses yakni: pertama, komunikasi antara formulator kebijakan kepada pelaksana kebijakan, dan yang kedua adalah komunikasi antara pelaksana kebijakan kepada kelompok target sasaran.

Proses komunikasi yang terjadi pada level formulator (pemerintah) kepada pelaksana (Kepala Sekolah) terjadi melalui beberapa cara, antara lain: secara virtual melalui webinar pemerintah, secara digital melalui PMM (Platform Merdeka Mengajar) dan bimbingan offline melalui forum MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah) namun dengan sistem perwakilan sekolah. Pada konteks ini komunikasi relatif memiliki banyak keterbatasan, baik dari sisi penyampaian informasi (transmission), kejelasan informasi (clarity) maupun kesinambungan informasi (Consistency). Kondisi tersebut akhirnya mendorong lembaga untuk mempelajari kebijakan Kurikulum Merdeka secara mandiri dengan menghadirkan nara sumber kompeten.

Adapun yang kedua, yaitu komunikasi pada level pelaksana kebijakan (Kepala Sekolah) kepada kelompok target sasaran (para guru). Komunikasi pada wilayah ini terlaksana dengan baik sehingga dikatakan telah mencapai indikator transmission. Dalam tataran praktis proses komunikasi tersebut diupayakan melalui beberapa cara, antara lain: melalui kegiatan rapat, melalui kegiatan pertemuan rutin hari sabtu, dengan pembentukan “tim kecil” sebagai komunikator, serta melalui kegiatan workshop dengan menghadirkan UMG sebagai nara sumber. Melalui berbagai upaya tersebut, proses komunikasi dapat tersampaikan secara detail (Clarity) dan berkesinambungan (Consistency).

Keberadaan sumber daya yang memadai menjadi salah satu variabel yang berpengaruh dalam Implementasi sebuah kebijakan. Berdasarkan hasil observasi, diketahui bahwasanya SMK Muhammadiyah 1 Taman Sidoarjo memiliki sumber daya yang memadai. Dalam hal sumber daya staf, SMK Muhammadiyah 1 Taman Sidoarjo diketahui memiliki tenaga kependidikan (SDM) yang memadai, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Secara kualitas, kondisi tersebut dapat diukur dari keandalan SDM yang dimiliki SMK Muhammadiyah 1 Taman Sidoarjo tatkala harus beradaptasi dengan dinamika perubahan yang ada. Karakteristik adaptif tersebut terbentuk melalui serangkaian proses pembiasaan yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan, misalnya melalui strategi rotasi kepanitiaan kegiatan sekolah. Dengan adanya sistem rotasi tersebut memungkinkan bagi seluruh SDM untuk bisa terlibat secara langsung dalam struktur kepanitiaan dari sebuah kegiatan. Keadaan inilah yang secara tidak langsung mampu mendorong terjadinya proses pemerataan kompetensi dari SDM yang ada.

Adanya sarana dan prasarana yang memadai juga termasuk bagian dari kelengkapan variabel sumber daya. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum, SMK Muhammadiyah 1 Taman Sidoarjo memiliki sarana dan prasarana yang sangat akomodatif. Kelengkapan sarana dan prasarana tersebut antara lain meliputi: Learning Management System (LMS) yang canggih, kelengkapan utilitas Hybrid Learning, 1 unit laptop sekolah yang selalu ready untuk setiap kelas, keberadaan tim IT sekolah, fasilitas jaringan internet yang stabil. Selain itu, saat masa pandemi SMK Muhammadiyah 1 Taman Sidoarjo juga mengalokasikan pendanaan ekstra untuk keperluan pembelian pulsa/data internet bagi guru dan siswa.

Elemen lain yang tidak kalah pentingnya pada variabel sumber daya ialah fasilitas yang berupa pendanaan (finansial). Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Kepala Sekolah, diketahui bahwasanya kondisi finansial SMK Muhammadiyah 1 Taman Sidoarjo dalam keadaan sehat. Sumber dana yang diperoleh SMK Muhammadiyah 1 Taman Sidoarjo

berasal dari perpaduan antara pendanaan pemerintah (dana BOS) dan pendanaan internal lembaga (SPP peserta didik). Pendanaan yang berasal dari pemerintah (dana BOS) secara keseluruhan berhasil terserap dan teralokasikan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Secara proporsi, pendanaan yang diperlukan untuk keperluan IKM lebih dominan bersumber dari dana internal sekolah. Salah satu contohnya ialah pendanaan pada kegiatan P5 (Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila), pada kegiatan tersebut pendanaan pemerintah dinilai tidak mencukupi, sehingga lembaga mengupayakan pendanaan ekstra yang bersumber dari dana kegiatan siswa (dana internal).

Variabel selanjutnya yang turut mempengaruhi implementasi sebuah kebijakan ialah disposisi atau sikap kooperatif yang dimiliki oleh para implementator. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, diketahui bahwasanya secara umum personil SMK Muhammadiyah 1 Taman Sidoarjo yang terlibat dalam IKM memiliki kepribadian yang positif, seperti: memiliki sifat amanah, jujur, istiqomah, sabar dan bertanggung jawab. Para personil tersebut juga memiliki dedikasi yang tinggi dalam merealisasikan keberhasilan proses IKM di SMK Muhammadiyah 1 Taman Sidoarjo. Hal tersebut dapat diukur dari bagaimana kesungguhan para guru dalam menjalani kegiatan karantina selama beberapa hari di luar kota. Kegiatan tersebut dilakukan untuk menuntaskan berbagai program sesuai dengan deadline yang telah ditentukan sebelumnya.

Selain itu, dedikasi juga ditunjukkan oleh pimpinan lembaga melalui adanya kepedulian yang tinggi terhadap berjalannya proses IKM. Kepala sekolah tidak henti-hentinya memberikan himbauan kepada para guru agar terus belajar dan mendalami esensi dari kebijakan Kurikulum Merdeka. Bahkan tidak jarang Kepala Sekolah memberikan teguran kepada sebagian oknum Guru yang bersikap skeptis, misalnya masih enggan untuk melakukan aktivasi akun PMM (Platform Merdeka Mengajar) yang notabene termonitor dengan baik pada sistem pemerintah.

Variabel terakhir yang juga turut memberikan pengaruh terhadap implementasi sebuah kebijakan adalah apa yang disebut dengan struktur birokrasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan WaKa Kurikulum, diketahui bahwasanya dalam implementasi kebijakan IKM ada beberapa SOP sekolah yang mengalami penyesuaian. Beberapa SOP yang mengalami penyesuaian antara lain yaitu: SOP mengenai proses asesmen, SOP terkait Kurikulum dan SOP cara pengambilan nilai. Beberapa SOP tersebut dimodifikasi agar bisa relevan dengan arah kebijakan IKM.

Berdasarkan pemaparan data tersebut, proses komunikasi merupakan salah satu variabel yang menjadi faktor penghambat utama dalam implementasi kebijakan Kurikulum Merdeka

di SMK Muhammadiyah 1 Taman Sidoarjo. Komunikasi yang dimaksudkan adalah komunikasi yang terjadi antara formulator kebijakan (pemerintah dengan) pelaksana kebijakan (Kepala Sekolah). Beberapa dampak yang muncul akibat persoalan tersebut antara lain: informasi yang kurang detail sehingga menyebabkan terjadinya interpretasi yang kurang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh formulator kebijakan (misalnya pada kegiatan P5), terjadinya bias informasi yang disebabkan oleh inkonsistensi penyampaian informasi oleh nara sumber (misalnya dalam persoalan asesmen), lembaga mengalami kesulitan dalam proses penentuan CP, TP dan ATP. Sedangkan empat variabel selain komunikasi, justru menjadi faktor pendukung dalam implementasi kebijakan Kurikulum Merdeka di SMK Muhammadiyah 1 Taman Sidoarjo.

E. KESIMPULAN

Penerapan kebijakan Kurikulum Merdeka di SMK Muhammadiyah 1 Taman Sidoarjo telah berjalan dengan baik. Hal tersebut diketahui dari keberhasilan lembaga dalam menerapkan kebijakan Kurikulum Merdeka pada tahapan yang sama, yakni pada level “Mandiri Berubah”.

Tersedianya berbagai fasilitas yang dimiliki oleh SMK Muhammadiyah 1 Taman Sidoarjo dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mensupport penerapan kebijakan Kurikulum Merdeka. Kondisi tersebut menjadikan SMK Muhammadiyah 1 Taman Sidoarjo nampak tidak banyak menjumpai kesulitan yang berarti dalam proses penerapan kebijakan Kurikulum Merdeka. Dengan adanya support fasilitas yang memadai, lembaga dengan leluasa dapat mengatasi berbagai hambatan yang ada, baik yang bersifat internal maupun eksternal.

Mempertimbangkan wacana penerapan Kurikulum Merdeka secara nasional pada tahun 2024, maka beberapa saran yang dapat tersampaikan melalui penelitian ini antara lain: pertama, agar pemerintah bisa meningkatkan intensitas proses komunikasi dalam kaitannya dengan kejelasan deskripsi dari informasi Kurikulum Merdeka. Untuk meminimalkan potensi terjadinya kesalahan interpretasi, sebaiknya dalam mengkomunikasikan Kurikulum Merdeka pemerintah lebih fokus menggunakan metode offline. Kedua, pemerintah seyogyanya juga memberikan concern lebih terhadap kondisi fasilitas lembaga. Hal tersebut dapat dilakukan dengan pemberian bantuan berupa dana maupun non danperalatan penunjang bagi sekolah-sekolah yang belum memiliki kecukupan dalam hal sumber daya.

DAFTAR PUSTAKA

- Muzamil, M. (2020). Urgensi Pendidikan Islam Dalam Memprogresivitasikan Sumberdaya Manusia Di Era Pandemi Ciovid-19. *Piwulang*, 65.
- Depdiknas. (2003). Undang-Undang Ri No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta.
- Selasih, N. (2016). Kaitan Pendidikan Dan Kepribadian Manusia Dalam Mencapai Tujuan Pendidikan Nasional. *Penjamianan Mutu*, 71.
- Sukaryadi, T. (2022). *Manajemen Kurikulum*. Banyumas. Purwokerto: Pena Persada.
- Qosim, N. (2019). *Manajemen Kurikulum Pendidikan Pesantren Salaf*. At- Ta'lim, 167-183.
- Sherly, E. D. (2020). Merdeka Belajar Di Era Pendidikan 4.0. *Konjerensi Nasional Pendidikan*, (Pp. 184-187).
- R. Vhalery, A. S. (2022). *Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka: Sebuah Kajian Literatur*. Education, 185.
- Rasidi, Z. A. (2020). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Ramdhan, M. (2021). *Metode Penelitian*. Jakarta: Cipta Media Nusantara.
- Rusli, R. A. (2021). *Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif Dan Studi Kasus*. Al Ubudiyah, 48-60.
- Musfiqon. (2012). *Panduan Lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Prestasi Pustakarya.
- Kaharuddin. (2020). *Kualitatif: Ciri Dan Karakter Sebagai Metodologi*. Equilib, 1-8.
- Herdayati, S. (2019). *Desain Penelitian Dan Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian*. Online Int.Nas., 1689-1699.
- Romadhon, R. F. (2021). *Pendidikan Agama Di Lingkungan Keluarga Menurut Nurcholish Madjid*. Education, 565.
- Fadhallah, R. (2021). *Wawancara*. Jakarta: Unj Press.
- Lenaini. (2021). *Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling*. *Kajian Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan*, 33-39.
- Mekarisce. (2020). *Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat*. *Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 145-151.
- Bachri. (2010). *Eyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif*. *Teknologi Pendidikan*, 46-62.
- Mariyani, A. A. (2020). *Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber Dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial*. *Historis*, 146-150.
- Hadi, S. (2017). *Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi*. *Ilmu Pendidikan*, 22.
- Hadi, A. A. (2021). *Penelitian Kualitatif: Studi Fenomenologi, Case Study, Grounded Theory, Etnografi, Biografi*. Jakarta: Pena Persada.
- Pratycia, D. P. (2023). *Analisis Perbedaan Kurikulum 2013 Dengan Kurikulum Merdeka*. *Pendidikan Sains Dan Komputer*, 58-64.

- Hutabarat, E. H. (2022). Analisis Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar Di Sma Negeri Sekota Padangsidimpuan. *Mathedu*, 58-69.
- Sumaryanti. (2023). Novasi Pembelajaran Bahasa Indonesia Dalam Kurikulum Merdeka Belajar Untuk Mewujudkan Profil Pelajar Pancasila. *Indonesia Sosial Teknologi*, 47-55.
- Roihanah. (2022). Proyek ‘Merawat Daur Biogeokimia Bumi’ Sebagai Penguatan Profil Pelajar Pancasila,. *Pendidikan Profesi Guru*, 86-99.
- Gandasari, S. A. (2022). Penyuluhan Pendidikan Tentang Kurikulum Merdeka Bagi Guru Sekolah Dasar. *Jppm*, 67-76.
- Safitri, W. H. (2022). Royek Penguatan Profil Pelajar Pancasila: Sebuah Orientasi Baru Pendidikan Dalam Meningkatkan Karakter Siswa Indonesia. *Basicedu*, 7076-7086.
- Rachmawati, M. N. (2022). Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Dalam Impelementasi Kurikulum Prototipe Di Sekolah Penggerak Jenjang Sekolah Dasar. *Basicedu*, 3613-3625.
- Solehudin, P. Z. (2022). Konsep Implementasi Kurikulum Prototype. *Basicedu*, 7486-7495.
- Irawati, I. A. (2022). Profil Pelajar Pancasila Sebagai Upaya Mewujudkan Karakter Bangsa. *Edumaspul*, 1224-1238.
- Handoyo, E. (2012). *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya.
- Tarigan, H. A. (2008). Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model Dan Kriteria Pengukurannya,. *Baca*, 1-19.
- Ramdhani. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik,. *Publik*, 1-12.
- W.M. Rusnita, M. H. (2017). Implementasi Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 45 Tahun 2012 Tentang Perubahan Pedoman Penilaian Pns Berprestasi. *Sorot*, 1-9.
- Lukitasari, S. A. (2017). Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi. *Kelola*, 121-134.
- Anhar, K. (2018). Analisis Implementasi Kebijakan Dokter Spesialis Jaga On Site Di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Dr. Mohammad Hoesin Palembang. *Arsi*, 3.
- S. W. Lukitasari, S. A. (2017). Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi. *Kelola*, 121-134.
- S. W. Lukitasari, S. (2017). Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi. *Kelola*, 121-134.
- Akib, H. (2008). Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model Dan Kriteria Pengukurannya. *Baca*, 1-19.
- Munthe, W. K. (2018). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Pada Penataan Kelembagaan Sekretariat Daerah. *Jppuma*, 38.
- Ramdhani, A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Publik*, 1-12.
- Z.N. Heliza, A. T. (2017). Disposition In The Implementation Of The Dhuha Prayer Policy In Madrasah Tsanawiyah. *Adab*, 19-28.
- Y. Widiawati, D. R. (2021). Implementasi Kebijakan Tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal Di Kota Tasikmalaya. *Ijpp*, 13-26.

- Syahrudin, S. (2016). Implementasi Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Merauke (Perspektif Pelayanan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kematian Dan Akta Kelahiran. Ilmu Ekonomi Dan Sosial, 117-134.
- Jusman, A. M. (2016). Mplementasi Kebijakan Dan Efektivitas Pengelolaan Terhadap Penerimaan Retribusi Di Pasar Lancirang Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang. Akmen, 13.

